

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dengan beranjak dari kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti, penelitian ini menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Pertama, peneliti telah menemukan beberapa faktor yang melatar belakangi dukungan IMF terhadap penggunaan *cryptocurrency*. Faktor pertama yang melatarbelakangi dukungan IMF terhadap penggunaan *cryptocurrency* adalah pengurangan biaya transaksi. Penggunaan teknologi *distributed ledger* dalam *cryptocurrency* dapat memangkas biaya atau bahkan tidak mengeluarkan biaya sama sekali.

Faktor yang kedua adalah potensi peningkatan perekonomian terutama di negara-negara berkembang. *Remittance* atau pengiriman uang lintas negara merupakan sumber GDP yang besar bagi banyak negara-negara berkembang. Dengan pengurangan atau hilangnya biaya transaksi, maka secara langsung pendapatan dari transaksi tersebut juga akan bertambah. Oleh karena itu pengurangan biaya transaksi dapat berpotensi meningkatkan perekonomian negara-negara berkembang.

Kemudian faktor yang ketiga adalah dalam segi keamanan. Ketatnya proses verifikasi dalam teknologi *distributed ledger* mengakibatkan sangat sulit untuk memodifikasi atau melakukan transaksi yang tidak sah. Selain itu pencatatan seluruh transaksi yang ada dalam *distributed ledger* juga mengakibatkan dibutuhkan usaha yang sangat besar dalam memodifikasi apapun dalam transaksi hingga mengakibatkan biaya yang dibutuhkan dalam melakukan pelanggaran lebih besar daripada keuntungan yang bisa didapatkan.

Faktor keempat adalah berkaitan dengan peningkatan efisiensi dalam dunia keuangan dan perbankan. Penggunaan *cryptocurrency* dan teknologi *distributed ledger* dapat meningkatkan kecepatan dalam bertransaksi. Selain itu, otomasi yang dihasilkan juga dapat memangkas banyak biaya dalam kegiatan perbankan. Oleh karena itu, penggunaan *cryptocurrency* dan teknologi *distributed ledger* dapat meningkatkan kecepatan transaksi berkali-kali lipat dan dapat memangkas biaya milyaran Dollar pertahun dalam kegiatan perbankan di dunia.

Selain faktor-faktor yang melatar belakangi dukungan IMF terhadap penggunaan *cryptocurrency*, peneliti menemukan bahwa IMF memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap negara-negara anggotanya. Sesuai dengan yang diutarakan S.L. Lammy, negara perlu bekerjasama dan menyerahkan sebagian dari kedaulatannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menanggapi masalah keamanan regional dan internasional. Dengan ditandatanganinya IMF *Article of Agreement* oleh negara-negara anggota, berarti bahwa negara-negara tersebut telah sukarela untuk menyerahkan sebagian dari kedaulatan mereka. Hal tersebut dikarenakan *Article of Agreement* yang ada secara tidak langsung memaksa negara-negara anggota untuk patuh terhadap syarat dan kondisi yang diberikan oleh IMF. Oleh karena itu, negara anggota tidak lagi memiliki kebebasan sepenuhnya dalam membuat kebijakan negaranya karena harus sesuai dengan syarat dan kondisi yang diatur dalam *Article of Agreement*. Selain itu juga negara akan dihadapkan kepada konsekuensi-konsekuensi yang ada apabila berperilaku tidak sesuai dengan *Article of Agreement* tersebut.

Terakhir, peneliti menemukan bahwa IMF juga menemukan pengaruh yang cukup besar terhadap kebijakan pemerintah Indonesia. Melihat sejarah interaksi antara Indonesia dengan IMF, dapat dilihat bahwa Indonesia mulai bergantung kepada pendanaan dari IMF sejak masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Meskipun Indonesia sempat keluar dari keanggotaan IMF, namun hal tersebut tidak berlangsung lama dan kembali bergabung kedalam keanggotaan IMF. Sejak kembalinya Indonesia kedalam keanggotaan IMF, Indonesia langsung kembali memanfaatkan sumber pendanaan dari IMF. Dengan adanya persyaratan perubahan kebijakan oleh negara yang melakukan peminjaman dana, hal tersebut berarti bahwa Indonesia mau tidak mau harus mengikuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh IMF. Hal tersebut menandakan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia banyak dipengaruhi oleh IMF. Cukup banyak kebijakan pemerintah Indonesia yang dibuat atas dasar pertimbangan IMF selama Indonesia memiliki hutang. Meskipun begitu, pengaruh IMF tidak hanya dirasakan saat Indonesia memiliki hutang kepada IMF. Sejak Indonesia melunasi kewajiban-kewajibannya pada tahun 2006, Indonesia tetap berperilaku sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi IMF. Hal tersebut

disebabkan karena Institusi akan berusaha untuk menegakkan kepatuhan dengan mencoba mengubah pikiran mereka yang mempertimbangkan untuk pergi atau dengan mengancam pembalasan jika mereka melakukan ketidak patuhan sesuai dengan yang diutarakan Hellmann & Wolf. Konsekuensi-konsekuensi ini dapat dilihat dengan jelas dalam *Letter of Agreement* yang disetujui oleh Indonesia. Belum lagi dalam keberjalanannya, dapat kita lihat bahwa IMF bukan hanya merupakan sebuah institusi internasional, IMF juga menciptakan sebuah rezim internasional yang mengatur perilaku negara-negara anggotanya dalam sektor perekonomian. Sesuai dengan yang diutarakan oleh Robert Keohane, Rezim Internasional merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar pengaturan sementara yang berubah dengan setiap pergeseran kepentingan, rezim berfungsi untuk memfasilitasi perjanjian-perjanjian yang ada. Selain itu Nye & Donahue menyatakan bahwa Rezim internasional seperti prinsip, norma, aturan, dan prosedur semuanya tetap menyiratkan kewajiban meskipun kewajiban tersebut tidak dapat ditegakkan melalui sistem hukum yang hirarkis. Oleh karena itu, Indonesia akan tetap berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh IMF dan nantinya.

Dengan ditandatanganinya Article of Agreement IMF, maka Indonesia harus patuh terhadap syarat dan kondisi yang sudah ditetapkan oleh IMF. Nantinya ketika IMF mengeluarkan peraturan atau rekomendasi terkait dengan penggunaan cryptocurrency dan teknologi block chain, Indonesia diharapkan akan berperilaku sesuai dengan aturan atau rekomendasi tersebut. Oleh karena itu meskipun Indonesia menolak penggunaan cryptocurrency, apabila muncul kebijakan atau peraturan mengenai cryptocurreny yang dikeluarkan oleh IMF, maka mau tidak mau Indonesia harus merubah kebijakannya dan harus mau mengikuti kebijakan tersebut.

4.2 Saran

Penelitian ini melihat bagaimana pesatnya perkembangan penggunaan *cryptocurrency* di dunia. Penggunaan *cryptocurrency* yang lintas batas tidak hanya akan berdampak kepada suatu negara namun juga terhadap perekonomian dunia. Besarnya penggunaan *cryptocurrency* hingga saat ini memiliki potensi

pengaruh yang besar terhadap perekonomian dunia. Penting untuk digarisbawahi, penggunaan *cryptocurrency* berkembang dengan sangat pesat seiring dengan berjalannya waktu. Selain itu, terdapat resiko dan potensi yang dihasilkan oleh penggunaan *cryptocurrency*. Oleh karena itu, negara-negara di dunia dan IMF perlu menaruh perhatian lebih kepada penggunaan *cryptocurrency*.

Meskipun pemerintah Indonesia sudah dengan tegas melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar di Indonesia, namun Pemerintah Indonesia tidak boleh menutup mata terhadap potensi-potensi yang dimiliki oleh *cryptocurrency*. Apabila ternyata penggunaan *cryptocurrency* terbukti dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dan membawa dampak positif terhadap masyarakatnya, Pemerintah Indonesia harus mau merubah kebijakannya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu mengkaji lebih dalam terkait penggunaan *cryptocurrency*.

Lahirnya *cryptocurrency* yang relatif baru juga mengakibatkan belum banyaknya penelitian yang mendalam terkait dengan dampak *cryptocurrency* terhadap perekonomian dunia. Selain itu juga fenomena penggunaan *cryptocurrency* baru saja mendapatkan perhatian dunia dalam beberapa tahun ini. Oleh karena itu, perlu ada penelitian-penelitian yang lebih mendalam terkait dengan dampak *cryptocurrency* terhadap perekonomian dunia yang terus menerus diperbaharui seiring dengan berkembangnya teknologi *cryptocurrency* dan perekonomian dunia.